

**KAJIAN PEMUTUSAN KONTRAK DAN SANKSI DAFTAR HITAM  
(BLACKLIST) PADA PENYEDIA BARANG/JASA PROYEK  
KONSTRUKSI DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

**ABSTRAK**

Pengenaan sanksi daftar hitam (*blacklist*) kepada 3 (tiga) badan usaha/perusahaan di Kabupaten Sijunjung berawal dari pemutusan kontrak yang diberikan oleh PPK Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sijunjung. Pemicu terjadinya pemutusan kontrak oleh PPK karena adanya permasalahan - permasalahan pada masa pelaksanaan kontrak yang tidak dapat ditangani oleh pihak PPK dan penyedia barang/jasa dengan baik, untuk itu diperlukan kajian tentang Pemutusan Kontrak dan Sanksi Daftar Hitam (*Blacklist*) pada Penyedia Barang/Jasa Proyek Konstruksi di Kabupaten Sijunjung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian prosedur proses pemutusan kontrak dan sanksi daftar hitam (*blacklist*) di Kabupaten Sijunjung, mengetahui permasalahan yang dialami penyedia barang/jasa sehingga terjadi pemutusan kontrak dan sanksi daftar hitam (*blacklist*), dan menemukan solusi agar penyedia barang/jasa tidak terkena pemutusan kontrak dan sanksi daftar hitam (*blacklist*) untuk masa yang akan datang. Pada penelitian ini penulis menggunakan metoda kualitatif yaitu dengan observasi dan wawancara langsung dengan para responden yang terdiri dari penyedia barang/jasa yang terkena sanksi *blacklist* di kabupaten Sijunjung. Hasil penelitian ini yaitu Proses pemutusan *blacklist* di kabupaten Sijunjung sudah sesuai dengan prosedur yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Akan tetapi terdapat ketidak tepatan jadwal pemberian surat peringatan dari PPK kepada penyedia barang/jasa hal ini tidak sesuai dengan yang telah disyaratkan dalam syarat-syarat umum kontrak tentang penanganan kontrak kritis. Permasalahan yang dialami penyedia barang/jasa selama pelaksanaan proyek sehingga proyek mengalami keterlambatan dan mengakibatkan pemutusan kontrak adalah faktor peralatan, faktor biaya, faktor cuaca, faktor tenaga kerja, faktor material, dan faktor lahan. Strategi yang harus dilakukan agar penyedia barang/jasa tidak terkena pemutusan kontrak untuk masa yang akan datang adalah Kontraktor harus sanggup menyediakan peralatan, Pengguna dan penyedia barang/jasa hendaknya melakukan *aanwijzing* lapangan, Penyedia barang/jasa harus mempunyai modal, Penyedia barang/jasa menyediakan tenaga ahli/personil tetap, Penyedia barang/jasa harus bisa mensiasati pekerjaan apabila cuaca berubah/hujan, Pengguna barang/jasa harus memastikan waktu pelaksanaan proyek sesuai dengan jadwal tradisi masyarakat turun ke sawah.

**Kata Kunci :** Proyek konstruksi, *blacklist*, pemutusan kontrak

**CONTRACT TERMINATION AND BLACKLIST SANCTIONS IN THE  
GOODS/SERVICE PROVIDER OF CONSTRUCTION PROJECT  
SERVICES IN SIJUNJUNG DISTRICT**

**ABSTRACT**

*Imposing sanctions black list to 3 (three) enterprises/company in the district sijunjung started from the termination given by the irrigation on the department of public works sijunjung district. Triggers the termination by PPK because of problems in the implementation of a contract that cannot be handled by the PPK and/service providers of goods well, it took studies on the termination and sanctions black list on/service providers of goods construction project in sijunjung. The purpose of this research is to find conformity procedure the process of their contracts terminated and sanctions a black list in sijunjung been mentioned, know the financial problems providers of goods and services to force a payoff then their contracts terminated and sanctions a blacklist, and find a solution so that providers of goods and services not exposed to their contracts terminated and sanctions a black list. The experimental work on this the use writers qualitative methods that is by observation and a live interview with the respondents who consisting of providers of goods and services that have been affected by sanctions in sijunjung. The results of the study are in the process of termination blacklist sijunjung district is in accordance with procedures are the rules of the president number 70 in 2012, there are however inaccuracy schedule the warning letter from the PPK to providers of goods/services it is not required in the suit that has been critical contract on the handling of public contracts. Problems in service providers of goods/during the project so that project delayed and resulting in the termination was a factor equipment, the cost factor, the bad weather, the labor, the material, and the land. Strategy must be done to service providers of goods/not hit by the termination to the future would go to contractor must be able to provides equipment, users and providers of goods/services should do *aanwijzing* field, providers of goods/services must have capital, providers of goods/services provided experts/permanent personnel, providers of goods/services should get the better of work when weather/rain changed, users goods/services must ensure that the project implementation time is in accordance with the tradition schedule of the community going to the fields.*

**Keyword :** *Project construction, blacklist, contract termination*